

**Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

**Joppie Immanuel Tarigan<sup>1</sup>**  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
jopipangkat@gmail.com

**Eka Nurmalia Sari<sup>2</sup>**  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
ekanurmalia@umsu.ac.id

***Abstract***

*The low quality of financial reports is inseparable from overlapping data, information that is difficult to access, delays in the reporting system, the use of desktop application systems that have limitations and obstacles in the information system network, weak internal controls causing difficulties in detecting fraud/accounting process inaccuracies, qualifications the expertise of the employee does not have an accounting education background and has an auditor certification. So this study aims to analyze the effect of accounting information systems, government internal control systems, human resource competencies on the quality of financial reports at the Regional Police of North Sumatra. The associative approach through survey is the method used in this research. While the data analysis used Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS). The results of the study concluded that the accounting information system and the government's internal control system did not have a significant effect on the quality of financial reports, but the competence of human resources had a significant effect on the quality of financial reports in the North Sumatra Regional Police. The implication of this research is that the North Sumatra Regional Police institution needs to make improvements and provide technology and information infrastructure, improve the professionalism of employees and leaders in the financial sector (auditors) through education and training activities (training).*

***Keywords: Accounting Information System, Internal Control System, Competence, Financial Reports.***

***Abstrak***

Rendahnya kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari data yang tumpang tindih, informasi yang sulit di akses, keterlambatan dalam sistem pelaporan, penggunaan sistem aplikasi desktop yang memiliki keterbatasan dan hambatan dalam jaringan sistem informasi, lemahnya pengendalian internal menyebabkan kesulitan mendeteksi kecurangan/ ketidakakuratan proses akuntansi, kualifikasi keahlian pegawai tidak berlatarbelakang pendidikan akuntansi dan memiliki sertifikasi auditor. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun pendekatan

asosiatif melalui survey merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan analisis data menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi maupun sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada lingkungan Polda Sumatera Utara. Implikasi penelitian ini diharapkan institusi Polda Sumatera Utara perlu melakukan perbaikan dan menyediakan infrastruktur teknologi dan informasi, meningkatkan profesionalitas pegawai dan pimpinan dalam bidang keuangan (auditor) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

**Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Laporan Keuangan.**

## 1. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan bertujuan agar dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dikemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan menggunakan 7 (tujuh) komponen dasar, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentu membutuhkan ketersediaan anggaran untuk merealisasikan visi dan misinya sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Ketersediaan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk optimalisasi berbagai aktivitas kepolisian harus dapat dipertanggung jawabkan institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam bentuk laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, dimana secara jelas mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode. Maka laporan keuangan yang dikelola institusi pemerintah harus

benar-benar berkualitas dengan kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami.

Namun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan pada institusi-institusi pemerintah termasuk Kepolisian Daerah Sumatera Utara umumnya sering tidak sesuai dengan harapan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan sangat rendah. Khusus pada lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai institusi penyelenggara negara yang bekerja dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, laporan keuangan yang disusun masih belum terlaksana secara baik dan benar sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan, kondisi ini terlihat dari keterlambatan dalam sistem pelaporan, data yang tumpang tindih, informasi yang sulit di akses, dan sebagainya. Rendahnya kualitas laporan keuangan tentu tidak terlepas dari kesalahan pegawai bagian keuangan yang tidak melakukan penilaian persediaan secara teliti saat penyusunan laporan keuangan, seperti kegiatan validasi nilai persediaan dan mengantisipasi munculnya dua sistem rekonsiliasi dalam satu laporan.

Sementara itu, *sistem informasi akuntansi* dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, masih menggunakan sistem aplikasi desktop. Penggunaan sistem ini umumnya memiliki keterbatasan dan hambatan dalam jaringan sistem informasi, karena dalam operasionalnya senantiasa membutuhkan update instal aplikasi. Jika update tidak dilakukan atau terlambat maka akan mempengaruhi proses rekonsiliasi pada saat data disinkronkan, sehingga mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Nugraheni dan Subaweh (2011), sistem informasi akuntansi memiliki peran, pengaruh serta faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang dihasilkan melalui penggunaan sistem informasi akuntansi berhubungan dengan aspek input, proses dan output yang baik. Jika ketiga aspek tersebut diterapkan secara terpadu dan berkesinambungan akan dapat menjadi fondasi dalam sistem pelaporan keuangan. Maka Uviyanti, Siti (2020) mengemukakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berhubungan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun berhubungan dengan *sistem pengendalian internal pemerintah* dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Ternyata pengendalian internal masih lemah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi kecurangan atau

ketidakakuratan proses akuntansi. Kemudian data akuntansi tidak kompeten disebabkan kompetensi auditor pada Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sumatera Utara tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi dan memiliki sertifikasi auditor, sehingga laporan tidak akurat dan kompetebel. Menurut Herawati (2014) sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya mengenai *kompetensi sumber daya manusia* dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya pada bagian keuangan pada umumnya masih rendah. Kondisi ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan bendahara bukan jurusan akuntansi dan tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagai auditor. Berdasarkan data SIPP Polda Sumut Tahun 2021, pegawai bagian keuangan pada satuan kerja dan satuan wilayah dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berpendidikan S-1 dengan kualifikasi pendidikan Akuntansi berjumlah 7 orang sedangkan berpendidikan S-2 tidak ada sama sekali.

Terciptanya pengelolaan keuangan secara baik tidak terlepas keberadaan sumber daya manusia yang kompeten melalui latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) keuangan dan akuntansi, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan. Pada entitas pemerintahan, pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan sangat dibutuhkan, agar mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Anisma (2014) berpandangan bahwa bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif agar eksistensi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyampaian laporan keuangan memiliki kualitas terbaik.

Berbagai problem yang dihadapi pegawai pada bagian keuangan dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas, merupakan fondasi bagi penulis untuk mempertanyakan sekaligus menjadi dasar tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini. Maka dapat dikemukakan bahwa tulisan ini bertujuan: *pertama*, mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Kedua*, mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Ketiga, mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan Kepolisian Republik Indonesia khususnya dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepolisian serta kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional Kepolisian Republik Indonesia. Dalam mewujudkan ke dua aspek dimana laporan keuangan harus didasarkan pada basis akrual. Dalam memberikan kerangka teoritis serta pengembangan hipotesis mengenai laporan keuangan berkualitas yang dihubungkan dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **2.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hubungan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan mengacu pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011. Dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Maka untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan Kepolisian Republik Indonesia, diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut.

Dalam pandangan Krismiaji (2015), tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi pada dasarnya, *pertama*, menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya; *kedua*, menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan;

*ketiga*, melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki oleh perusahaan.

Melalui penerapan sistem informasi akuntansi pada umumnya dapat memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Justifikasi dari pernyataan ini tentu tidak terlepas dari berbagai temuan penelitian yang dilakukan para penelitian sebelumnya, seperti Astrawan, *dkk.* (2016), Riyadi (2020), Patongai, *dkk.* (2018), dan Almumtahanah dan Samukri (2019) yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tentunya temuan penelitian mereka perlu dilakukan pengujian kembali pada objek berbeda, dimana pada penelitian ini dilakukan pada lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan mengajukan hipotesis penelitian:

**H1.** *Ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan*

## **2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pengendalian intern dalam Kepolisian Republik Indonesia merupakan proses integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus pimpinan dan seluruh aparat kepolisian untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika pengendalian intern tidak berfungsi dengan baik, tentunya akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam laporan keuangan, sehingga menjadikan laporan keuangan belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang handal.

Mahmudi (2010) berpandangan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui dan diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam sistem akuntansi akan mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), sehingga kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi dari bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ketentuan ini didukung dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya

Yensi, *dkk.* (2015), Mokoginta, *dkk.* (2017), Rusvianto, *dkk.* (2018), dan Akbariah dan Suratno (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbagai temuan penelitian sebelumnya, tentunya tidak dapat dijadikan sebagai hasil penelitian mutlak, sebab kondisi pada objek penelitian yang berbeda tentu dapat mempengaruhi terhadap temuan penelitian berbeda. Maka dalam penelitian yang dilakukan pada lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, perlu di uji kembali dengan menetapkan hipotesis:

**H2.** *Ada pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan*

### **2.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, dorongan, pengetahuan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan 60 karsa) (Sutrisno, 2010). Semua potensi Sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar.

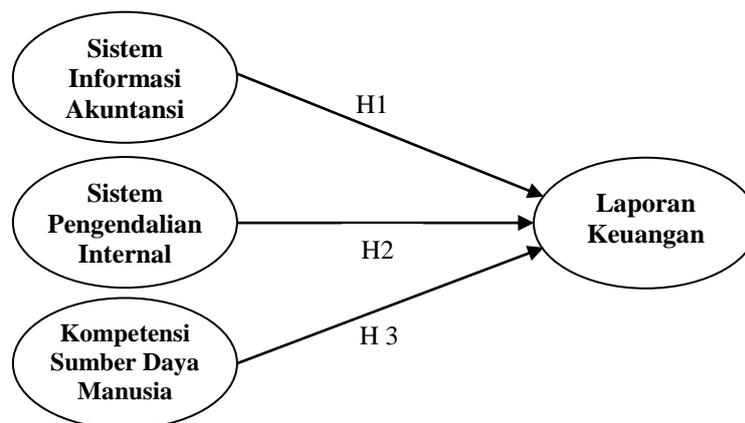
Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentu akan memiliki dampak positif berupa peningkatan kompetensi mereka. Maka sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tentu sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Sebab kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama (Sedarmayanti, 2009).

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tentu memberikan dampak positif terhadap aktivitas kerja dalam suatu organisasi atau institusi/lembaga. Kondisi ini juga berlaku pada institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya dalam bidang keuangan yang melakukan tugas dan tanggungjawab penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, kompetensi sumber daya manusia pada prinsipnya memberikan dampak positif terhadap tersusunanya laporan keuangan

berkualitas. Dasar dari pemikiran ini tidak terlepas dari berbagai temuan penelitian sebelumnya, seperti Setyowati, *dkk.* (2016), Pujanira dan Taman (2017), dan Yensi, *dkk.* (2015) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini tentunya belum dapat dijadikan secara ketentuan final dalam suatu penelitian. Maka dalam melakukan pengujian ulang terhadap temuan penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian dengan objek berbeda, yaitu dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan mengajukan hipotesis

**H3: Ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan**

Berbasarkan kerangka teori yang dikemukakan di atas maka secara struktural kerangka konsep untuk melihat hubungan/pengaruh antar variable pada penelitian dapat dikemukakan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Kerangka Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu. Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan kompetensi SDM terhadap Kualitas laporan Keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini

menggunakan metode survey dari suatu populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable pada dasarnya menjelaskan tentang variabel, definisi, indikator, dan skala pengukuran. Adapun definisi operasional penelitian dikemukakan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Defenisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	Suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. (Romney 2015)	1. Orang (pengguna sistem) 2. Prosedur dan Instruksi 3. Data 4. Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) 5. Infrastruktur teknologi informasi 6. <i>Internal controls and security measures</i>	Ordinal
2	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (X2)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. (Purnomo 2014)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Ordinal
3	Kompetensi SDM (X3)	Kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama. (Anisma 2014)	1. Pengetahuan ( <i>knowledge</i> ) 2. Keterampilan ( <i>skill</i> ) 3. Sikap ( <i>attitude</i> )	Ordinal

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas Laporan Keuangan adalah informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan (Rahman 2015)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Ordinal

#### 4. HASIL PENELITIAN

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* yang diolah menggunakan software SmartPLS. Adapun hasil analisis data di evaluasi dari hasil *outer model* dan *inner model*.

##### 3.3. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam menganalisis hasil dari model pengukuran (*outer model*) dilakukan melalui *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Tujuannya untuk mengetahui nilai *loading factor* pada variable-variabel laten beserta indikatornya, nilai *cross loading factor* sebagai upaya dalam mengetahui keberadaan diskriminan pada konstruk, serta reliabilitas indicator pada masing-masing variabel.

##### Uji *Convergent Validity*

Nilai *convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai *convergent validity* digunakan untuk mengetahui validitas suatu konstruk. Indikator dikatakan valid jika nilai faktor loading di atas 0,6 (Ghozali dan Latan, 2015:76). Pada penelitian ini, terdapat empat variabel dengan 27 indikator. Indikator tersebut diantaranya, 8 indikator untuk *sistem informasi akuntansi*, 6 indikator untuk *sistem pengendalian internal pemerintah*, 6 indikator untuk kompetensi sumber daya manusia, dan 7 indikator untuk *kualitas laporan keuangan*. Berdasarkan keterangan gambar di atas dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

**Table 2**  
**Convergent Validity Tahap Pertama**

Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X1.1	0,613	0,60	Layak

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thimb	Keterangan
X1.2	0,740	0,60	Layak
X1.3	0,694	0,60	Layak
X1.4	0,623	0,60	Layak
X1.5	0,835	0,60	Layak
X1.6	0,826	0,60	Layak
X1.7	0,472	0,60	Tidak Layak
X1.8	0,571	0,60	Tidak Layak
X2.1	0,834	0,60	Layak
X2.2	0,828	0,60	Layak
X2.3	0,843	0,60	Layak
X2.4	0,884	0,60	Layak
X2.5	0,916	0,60	Layak
X2.6	0,894	0,60	Layak
X2.7	0,658	0,60	Layak
X3.1	0,734	0,60	Layak
X3.2	0,806	0,60	Layak
X3.3	0,834	0,60	Layak
X3.4	0,840	0,60	Layak
X3.5	0,653	0,60	Layak
X3.6	0,802	0,60	Layak
Y1	0,467	0,60	Tidak Layak
Y 2	0,682	0,60	Layak
Y 3	0,743	0,60	Layak
Y 4	0,800	0,60	Layak
Y 5	0,790	0,60	Layak
Y 6	0,790	0,60	Layak
Y 7	0,603	0,60	Layak

Sumber: Data diolah, 2021

Table 2 memperlihatkan bahwa nilai *loading factor* pada *convergent validity* terdapat 3 indikator yang tidak layak untuk dijadikan sebagai indikator untuk menganalisis model selanjutnya, disebabkan *loading factor* < 0,6. Maka indikator yang tidak layak di buang, yaitu X1.7, X1.8, dan Y1. Selanjutnya dilakukan analisis ulang. Adapun hasilnya dikemukakan sebagai berikut:

**Table 3**  
**Convergent Validity Tahap Kedua**

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X1.1	0,633	0,60	Layak
X1.2	0,719	0,60	Layak
X1.3	0,679	0,60	Layak
X1.4	0,633	0,60	Layak
X1.5	0,869	0,60	Layak
X1.6	0,830	0,60	Layak

Indikator	Loadig Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X2.1	0,832	0,60	Layak
X2.2	0,828	0,60	Layak
X2.3	0,838	0,60	Layak
X2.4	0,878	0,60	Layak
X2.5	0,921	0,60	Layak
X2.6	0,895	0,60	Layak
X2.7	0,665	0,60	Layak
X3.1	0,727	0,60	Layak
X3.2	0,805	0,60	Layak
X3.3	0,831	0,60	Layak
X3.4	0,838	0,60	Layak
X3.5	0,650	0,60	Layak
X3.6	0,810	0,60	Layak
Y 2	0,671	0,60	Layak
Y 3	0,724	0,60	Layak
Y 4	0,817	0,60	Layak
Y 5	0,791	0,60	Layak
Y 6	0,804	0,60	Layak
Y 7	0,603	0,60	Layak

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh nilai *loading factor* pada *convergent validity* untuk masing-masing indikator lebih besar dari 0,6 dalam pengertian *loading factor* > 0,6, sehingga seluruh indikator dalam kategori layak. Maka seluruh data dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

#### Uji *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminan validity* dilihat dari nilai faktor *cross loading*, tujuannya untuk mengetahui kemampuan sebuah indikator pada variabel laten yang diteliti apakah memiliki indikator lebih kuat dibandingkan dengan indikator yang merefleksikan indkator laten lain. Hasil *discriminant validity* dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
***Discriminant Validity Cross Loading Indikator***

INDIKATOR	SIA (X1)	SPIP (X2)	KSDM (X3)	KLK (Y)
X1.1	0,633	-0,087	0,238	0,032
X1.2	0,719	-0,083	0,049	0,132
X1.3	0,679	-0,138	0,018	0,043
X1.4	0,633	-0,026	0,080	0,005
X1.5	0,869	-0,066	0,075	0,199
X1.6	0,830	-0,099	0,096	0,139

INDIKATOR	SIA (X1)	SPIP (X2)	KSDM (X3)	KLK (Y)
X2.1	-0,011	0,832	0,059	-0,004
X2.2	-0,003	0,828	0,065	-0,043
X2.3	-0,011	0,838	0,029	-0,030
X2.4	-0,082	0,878	0,030	-0,126
X2.5	-0,132	0,921	0,057	-0,131
X2.6	-0,094	0,895	-0,041	-0,093
X2.7	-0,166	0,665	-0,048	-0,035
X3.1	0,065	0,027	0,727	0,092
X3.2	0,127	0,092	0,805	0,154
X3.3	0,022	0,047	0,831	0,165
X3.4	0,161	-0,069	0,838	0,161
X3.5	0,139	0,183	0,650	0,128
X3.6	0,012	-0,068	0,810	0,269
Y 2	0,108	-0,016	0,132	0,671
Y 3	0,121	-0,130	0,193	0,724
Y 4	0,122	-0,102	0,226	0,817
Y 5	0,175	-0,157	0,148	0,791
Y 6	0,197	-0,131	0,192	0,804
Y 7	0,029	-0,156	0,095	0,600

Sumber: Data diolah, 2021

Table 4. memperlihatkan bahwa nilai *cross loading* pada masing-masing variabel secara independen terhadap indikator independen lebih besar dari nilai indikator independen antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan. Adapun untuk melihat *discriminant validity* dapat juga dilihat dari table Fornell-Larcker. Adapun untuk menetapkan parameter *cross loading* pada *discriminant validity* adalah  $> 0,70$  untuk setiap variabel (Ghozali dan Latan, 2015:77). Adapun hasil analisisnya dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Table 5**

***Discriminant Validity Cross Loading Variabel***

	SIA (X1)	SPIP (X2)	KSDM (X3)	KLK (Y)
SIA (X1)	0,733			
SPIP (X2)	-0,107	0,840		
KSDM (X3)	0,100	0,024	0,780	
KLK (Y)	0,182	-0,114	0,228	0,793

Sumber: Data diolah, 2021

Table 5. memperlihatkan bahwa nilai *cross loading* pada *discriminant validity* pada masing-masing variabel yaitu variabel *Sistem Informasi Akuntansi* (X1) sebesar

0,733, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* (X2) sebesar 0,840, *Kompetensi Sumber Daya Manusia* (X3) sebesar 0,780, dan *Kualitas Laporan Keuangan* (Y) sebesar 0,793, dimana keseluruhan masing-masing variabel nilainya lebih dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel pada *discriminant validity cross loading* memiliki tingkat validitas yang baik. Hal ini juga dapat di kuatkan dengan menganalisis nilai validitas suatu kostruk melalui *Average Variance extacted* (AVE) dengan parameter lebih besar 0,50 (Ghozali dan Latan, 2015: 76).

### Uji *Composite Reliability*

Konsistensi dari butir pertanyaan merupakan syarat dari *composite reliability*. Agar dapat diketahui tingkat keakuratan dari data pada masing-masing variabel berdasarkan jawaban yang diberikan responden. Adapun parameter dalam menetapkan *composite reliability* dalam kategori memenuhi syarat adalah  $> 0,70$ . Hasil analisis pada *composite reliability* dikemukakan pada table di bawah ini:

**Tabel 6**  
***Composite Reliability***

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Sistem Informasi Akuntansi	0,873
Sistem Pengendalian Internal Akuntansi	0,943
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,902
Kualitas Laporan Keuangan	0,877

Sumber: Data diolah, 2021

Table 6. memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* pada variabel *Sistem Informasi Akuntansi* adalah  $0,873 > 0,70$ ; nilai *composite reliability* pada variabel *Sistem Pengendalian Internal Akuntansi* adalah  $0,943 > 0,70$ ; nilai *composite reliability* pada variabel *Kompetensi Sumber Daya Manusia* adalah  $0,902 > 0,70$ ; dan nilai *composite reliability* pada variabel *Kualitas Laporan Keuangan* adalah  $0,877 > 0,70$ . Maka dengan demikian bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi persyaratan untuk mengukur *composite reliability*.

### 3.4. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi terhadap model structural (*inner model*) dilakukan dengan cara menguji nilai *R-Square*. Adapun pengujian *R-Square* dilakukan pada setiap variabel latent sebagai bentuk dari uji *goodness-fit model*. Hasil struktur model PLS dari nilai *R-Square* dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

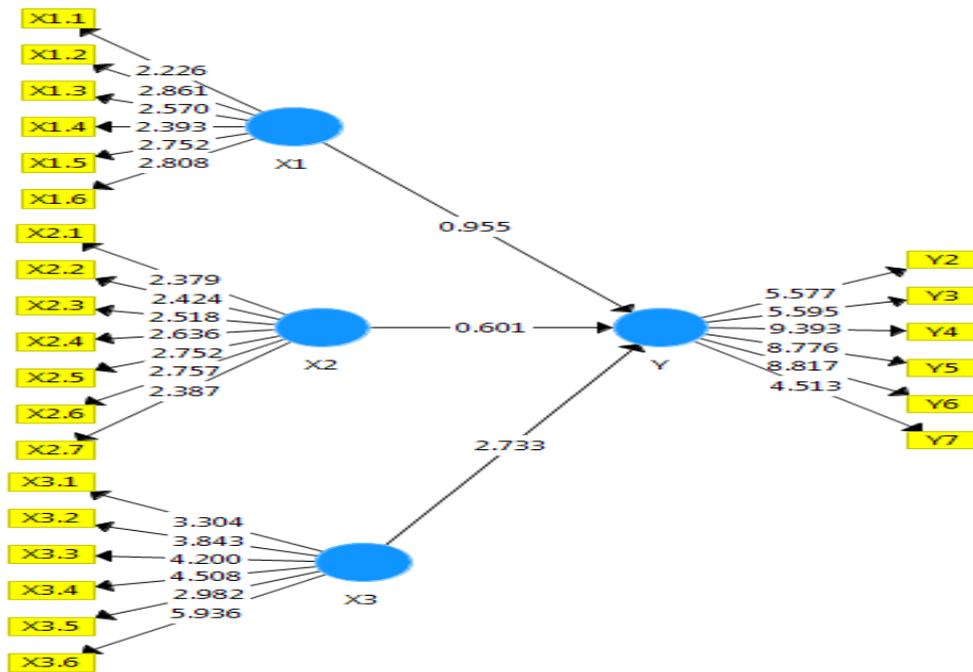
**Tabel 7**  
***R-Square***

	$R^2$
Kualitas Laporan Keuangan	0,088

Sumber: Data diolah, 2021

Table 7. memperlihatkan bahwa nilai *R-Square* diperoleh sebesar 0,088, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pada model penelitian ini menunjukkan, variabel Sistem Informasi Akuntansi (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) terhadap *Kualitas Laporan Keuangan* (Y) secara substantive lemah. Hal ini didasarkan pada pendapat Ghozali dan Latan (2015:78) yang mengemukakan bahwa perubabahn nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen, apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Maka untuk melihat pengaruh terhadap model penelitian antara varibel eksogen terhadap variabel endogen, Chan (Ghozali dan Latan, 2015:78) menetapkan kriteria. Jika nilai *rule of thumb* sebesar 0,67 maka model kuat, 0,33 model moderate, dan 0,19 model lemah. Adapun hasil analisis data memperlihatkan dimana nilai *R-Square* diperoleh sebesar 0,088, sehingga disimpulkan bahwa model sangat lemah.

Analisis data menggunakan SmartPLS melalui *bootstrapping* dalam uji hipotesis, diperoleh output *bootstrapping* pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Output Bootstrap

### 3.5. Uji Hipotesis

Analisis data menggunakan *bootstrapping* untuk penetapan uji hipotesis, dapat dilihat nilai t-hitung pada gambar 2 di atas serta tabel 8 di bawah ini. Dalam pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan ketentuan jika nilai  $t_{statistic} > t_{table}$  (1,980) atau dapat juga diketahui melalui nilai  $p-values < 0,05$ . Adapun hasil uji hipotesis dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Table 8**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

	Coefficient	t-statistic	P-Value	Keputusan
SIA → KLK	0,150	0,955	0,340	Terima H0
SPIP → KLK	-0,103	0,601	0,548	Terima H0
KSDM → KLK	0,215	2,733	0,006	Tolak H0

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis data yang dikemukakan pada tabel 8 maka dapat interpretasi dalam pengujian hipotesis penelitian ini:

a. Pengujian Hipotesis Pada H1

Hasil analisis uji *statistic* pada H1, diperoleh nilai t statistic sebesar 0,955 dengan p-value sebesar 0,34. Maka dapat dikemukakan bahwa  $t_{statistic} < t_{table}$  (0,955 <

1,980 atau  $0,340 > 0,05$ . Dengan demikian disimpulkan bahwa *Sistem Informasi Akuntansi* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan* pada lingkungan Polda Sumatera Utara.

b. Pengujian Hipotesis Pada H2

Hasil analisis uji *statistic* pada H2, diperoleh nilai *t statistic* sebesar 0,601 dengan *p-value* sebesar 0,548. Maka dikemukakan bahwa  $t\ statistic < t\ table$  ( $0,601 < 1,980$  atau  $0,548 > 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan* pada lingkungan Polda Sumatera Utara.

c. Pengujian Hipotesis Pada H3

Hasil analisis uji *statistic* pada H3, diperoleh nilai *t statistic* sebesar 2,733 dengan *p-value* sebesar 0,006. Maka dapat dikemukakan bahwa  $t\ statistic > t\ table$  ( $2,733 > 1,980$  atau  $0,006 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Komptensi Sumber Daya Manusia* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan* pada lingkungan Polda Sumatera Utara.

### 3.6. Pembahasan

#### a. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, disebabkan nilai nilai *p-value* sebesar  $0,34 > 0,05$ , sehingga terjadi penolakan terhadap H1. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan penguasaan dan pemanfaatan pegawai dalam teknologi masih sangat rendah. Disamping itu infrastruktur dan software akuntansi yang tersedia masih terbatas. Sehingga implementasi sistem informasi akuntansi belum berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Solihah (2020), bahwa sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,822 lebih besar dari 0,05. Begitu juga temuan penelitian yang dilakukan Aguswen, *dkk.* (2020) bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pada SUPM Ladong Kabupaten Aceh Besar, dengan nilai  $t$ -hitung  $< t$ -table ( $0.951 < 1.667$ ).

Permasalahan yang terdapat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi berbasis desktop, selama ini penggunaan sistem aplikasi desktop pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, memiliki hambatan dalam jaringan sistem informasi, karena senantiasa membutuhkan update instal aplikasi, agar dapat memperbaharui fitur yang ada sebelumnya. Sebelum aplikasi yang terbaru bisa di update, maka proses input data dilakukan secara manual, hal ini disebabkan update aplikasi membutuhkan beberapa kode akun yang berubah. Bahkan instruksi untuk mengupdate aplikasi sudah terbit, sementara file update aplikasi belum keluar. Kondisi ini tentunya menyebabkan user harus menunggu sampai aplikasi tersebut bisa diupdate.

Berdasarkan temuan penelitian yang menyatakan penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu pada pernyataan pengguna sistem (orang) bagian akuntansi yang ditugaskan dalam menyusun laporan harus mampu menguasai dan memanfaatkan perangkat teknologi komputer secara baik. Bahwa dari hasil pernyataan responden diatas sesuai dengan realita yang ada di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hal ini disebabkan karena Kompetensi SDM yaitu Bendahara pada lingkungan Polda Sumut telah mumpuni dalam dan memiliki pengalaman dalam fungsi keuangan sehingga tidak mengurangi kualitas laporan keuangan itu sendiri.

Untuk menerapkan Sistem informasi akuntansi yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara maka langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pembina fungsi yaitu Bidang keuangan Polda Sumut agar dapat memberikan saran dan masukan kepada Kementerian Keuangan dalam perubahan Sistem berbasis desktop ke berbasis Web.

Temuan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya pada lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa sistem informasi akuntansi masih menggunakan aplikasi desktop bukan menggunakan sistem aplikasi web. Sehingga mengalami hambatan dalam sistem jaringan sistem informasi, karena senantiasa membutuhkan update instal aplikasi, agar fitur sebelumnya dapat diperbaharui. Bahkan proses rekonsiliasi turut mengalami keterlambatan, karena

harus dilakukan setiap bulan. Maka akhirnya kualitas laporan keuangan dapat menimbulkan keterlambatan serta tingkat akurasi laporan yang rendah, hal ini tentunya mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan. Permasalahan yang terdapat dilingkungan Polda Sumatera Utara berhubungan dengan *sistem informasi akuntansi*, tentu tidak terlepas dari temuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya yang dikemukakan pada pembahasan sebagai berikut:

Temuan penelitian berhubungan dengan *sistem informasi akuntansi*, semula diukur menggunakan delapan indikator, namun hasil uji *convergent validity* terdapat dua indikator yang tidak memenuhi kriteria, sehingga untuk analisis selanjutnya dua indikator tersebut dibuang. Sehingga pengukuran variabel *sistem informasi akuntansi* menggunakan enam indikator, yaitu pengguna sistem (orang) dalam menyusun laporan; pengguna sistem (orang) memiliki software akuntansi; prosedur dan instruksi; data; perangkat lunak (*software*); dan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis berhubungan dengan *outer loading*, dimana menunjukkan bahwa indikator yang memiliki *outer loading* tertinggi adalah berhubungan dengan *perangkat lunak (software)* yaitu sebesar 0,869. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *perangkat lunak (software)*, terdapat responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *pemanfaatan teknologi informasi memudahkan satuan kerja bagian akuntansi dalam mengakses, mengelola, dan mengoptimalkan informasi keuangan secara cepat dan tepat*.

Indikator yang memiliki *outer loading* kedua adalah berhubungan dengan *infrastruktur teknologi informasi* yaitu sebesar 0,830. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *infrastruktur teknologi informasi* dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden (3,60 %) atas pernyataan berhubungan tentang *penggunaan teknologi informasi menjamin ketersediaan dan keamanan data laporan keuangan*.

Indikator yang memiliki *outer loading* ketiga adalah berhubungan dengan pengguna sistem (orang) dalam menyusun laporan yaitu sebesar 0,719. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang pengguna sistem (orang) dalam menyusun laporan dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *pengguna*

*sistem (orang) bagian akuntansi harus memiliki software akuntansi dalam memudahkan & mempercepat dalam menyusun laporan keuangan.*

Indikator yang memiliki *outer loading* keempat adalah berhubungan dengan *prosedur dan instruksi* yaitu sebesar 0,679. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang prosedur dan instruksi, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *satuan kerja bagian akuntansi harus memiliki infrastruktur yang baik dalam mendukung kegiatan operasional penggunaan komputer.*

Indikator yang memiliki *outer loading* paling rendah adalah berhubungan dengan indikator pengguna sistem (orang) memiliki software akuntansi serta indikator data, dengan nilai yang sama yaitu sebesar 0,633. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang pengguna sistem (orang) memiliki software akuntansi, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *pengguna sistem (orang) bagian akuntansi yang ditugaskan dalam menyusun laporan harus mampu menguasai dan memanfaatkan perangkat teknologi komputer secara baik.* Sementara itu analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang data, juga masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden (0,90 %) atas pernyataan berhubungan tentang *ketersediaan dan optimalisasi jaringan internet akan dapat mempercepat dalam pengiriman informasi dan data kepada satuan kerja.*

Temuan penelitian ini tentu berolak belakang dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya, dimana mayoritas menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Astrawan, *dkk.*, 2016; Riyadi, 2020; Patongai, *dkk.*, 2018). Hal ini juga dikuatkan dengan dasar teori yang dikemukakan Hutahaean (2014) bahwa sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di butuhkan

## **b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, disebabkan nilai

*p-value* sebesar  $0,548 > 0,05$ , sehingga terjadi penolakan terhadap H2. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pemahaman pegawai terhadap kode etik akuntansi masih rendah, tingkat efektivitas pemeriksaan pimpinan pada catatan akuntansi tidak maksimal, rendahnya kemampuan pimpinan dalam melakukan analisis resiko. Kondisi ini tentu memberikan dampak terhadap sistem pengendalian internal pemerintah, sehingga mempengaruhi pada penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Pasha (2018), bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Grobogan, dengan nilai  $t_{hitung} < t_{table}$  ( $1,254 < 2,014$ ). Begitu juga temuan penelitian Yendrawati (2013) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, serta temuan penelitian Tullah, *dkk.*, (2018) bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah Provinsi di Jawa Barat dan Banten.

Temuan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dimana kompetensi auditor pada Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sumatera Utara masih rendah. Sementara itu kualifikasi pendidikan auditor tidak dalam bidang akuntansi serta tidak memiliki sertifikasi auditor. Sehingga pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan di lingkungan Polda Sumut, laporan yang dihasilkan tidak akurat dan komptebel untuk melihat keberhasilan dan kualitas laporan keuangan dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan data dari SIPP Polda Sumut, 2021, seluruh auditor dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak kualifikasi pendidikan pegawai seluruhnya non-akuntansi. Tentunya kondisi ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (4) UU Nomor 01 Tahun 2004. Permasalahan yang terdapat dilingkungan Polda Sumatera Utara, berhubungan dengan *sistem pengendalian internal pemerintah* tentu tidak terlepas dari temuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya yang dikemukakan pada pembahasan sebagai berikut:

Temuan penelitian berhubungan dengan pengukuran terhadap *sistem pengendalian internal pemerintah*, dimana penelitian ini menggunakan tujuh indikator setelah melalui uji *convergent validity*. Adapun tujuh indikator tersebut adalah

pengendalian lingkungan sesuai kode etik profesi akuntansi; pengendalian lingkungan dengan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus; penilaian resiko dilakukan otoritas berwenang; penilaian resiko menghindari pelanggaran sistem akuntansi; aktivitas pengendalian untuk mengamankan fisik pada asset; saluran komunikasi pada informasi keuangan; dan pemantauan dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis berhubungan dengan *outer loading*, pada variabel *sistem pengendalian internal pemerintah*, dimana menunjukkan bahwa indikator yang memiliki *outer loading* tertinggi adalah berhubungan dengan aktivitas pengendalian untuk mengamankan fisik pada asset, yaitu sebesar 0,921. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang aktivitas pengendalian untuk mengamankan fisik pada asset, dimana terdapat responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *kebijakan dan prosedur terhadap pengamanan fisik pada asset perlu diterapkan secara baik dan benar dengan selalu mendokumentasikan setiap pengeluaran uang (biaya) instansi*.

Indikator yang memiliki *outer loading* kedua adalah berhubungan dengan *saluran komunikasi pada informasi keuangan* yaitu sebesar 0,895. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang saluran komunikasi tentang informasi keuangan dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden (3,60 %) atas pernyataan berhubungan tentang *ketersediaan saluran komunikasi dalam mendapatkan informasi mengenai keuangan instansi harus senantiasa tersedia tepat waktu*.

Indikator yang memiliki *outer loading* ketiga adalah berhubungan dengan *penilaian resiko menghindari pelanggaran sistem akuntansi* yaitu sebesar 0,878. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *penilaian resiko menghindari pelanggaran sistem akuntansi* dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden (3,60 %) atas pernyataan berhubungan tentang *pimpinan perlu melakukan analisis resiko secara komprehensif untuk menghindari terjadinya pelanggaran sistem akuntansi yang dijalankan*.

Indikator yang memiliki *outer loading* keempat adalah berhubungan dengan *penilaian resiko dilakukan otoritas berwenang*, yaitu sebesar 0,838. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *penilaian resiko*

*dilakukan otoritas berwenang, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 responden (5,50 %) atas pernyataan berhubungan tentang setiap penggunaan anggaran untuk aktivitas satuan kerja harus ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.*

Indikator yang memiliki *outer loading* kelima adalah berhubungan dengan *pengendalian lingkungan sesuai kode etik profesi akuntansi*, yaitu sebesar 0,832. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *pengendalian lingkungan sesuai kode etik profesi akuntansi*, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden (4,50 %) atas pernyataan berhubungan tentang *dalam menjalankan tugasnya, seluruh satuan kerja bagian akuntansi harus mematuhi kode etik profesi akuntansi pemerintah.*

Indikator yang memiliki *outer loading* keenam adalah berhubungan dengan indikator *pengendalian lingkungan dengan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus*, yaitu sebesar 0,828. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *pengendalian lingkungan dengan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus*, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden (4,50 %) atas pernyataan berhubungan tentang *pimpinan keuangan perlu melakukan pemeriksaan secara terus-menerus terhadap seluruh catatan akuntansi, fisik kas, barang untuk menilai kualitas dari pengendalin internal laporan keuangan.*

Indikator yang memiliki *outer loading* paling rendah adalah berhubungan dengan indikator *pemantauan dalam penggunaan anggaran*, yaitu sebesar 0,665. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *pemantauan dalam penggunaan anggaran*, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden (4,50 %) atas pernyataan berhubungan tentang *pengguna anggaran atau pemegang kas pada masing-masing satuan kerja bagian akuntansi perlu menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu.*

Dari permasalahan pada lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah berhubungan dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada dasarnya pelaksanaan pengendalian, telah sesuai dengan arahan Pimpinan Pusat Kepolisian Republik Indonesia. Namun tentu masih terdapat berbagai hambatan yang muncul,

seperti masih lemahnya pengendalian internal dilakukan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi kecurangan/ketidaktekuran proses akuntansi. Kondisi ini tentu akan menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Temuan Penelitian bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu pada pernyataan pengguna anggaran atau pemegang kas pada masing-masing satuan kerja bagian akuntansi perlu menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu. Hal ini disebabkan dikarenakan Fungsi Pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak memahami bagiannya dikarenakan personel yang mengawaki fungsi pengawasan masih baru itu disebabkan terjadi permutasian di satuan kerja Inspektorat Mapolda Sumut dan Seksi Pengawasan di Satwil jajaran Polda Sumut (Polres). Jadi dapat disimpulkan SPIP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dikarenakan Bendahara pada satuan kerja di lingkungan Polda Sumut telah menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara maka langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan Pelatihan Fungsi Pengawasan agar dapat meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Temuan penelitian ini tentu bertolak belakang dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya, dimana mayoritas menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Mokoginta, *dkk*, 2017; Rusvianto, *dkk.*, 2018; Akbariah dan Suratno, 2018). Hal ini juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, tujuan sistem pengendalian internal pemerintah salah satunya dimana akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat di andalkan. Maka dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian dalam hal keandalan, efektif dan efisien laporan keuangan.

### c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, disebabkan nilai *p-value* sebesar  $0,006 > 0,05$ , sehingga terjadi penerimaan terhadap  $H_a3$ . Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Temuan penelitian berhubungan dengan pengukuran terhadap *kompetensi sumber daya manusia*, dimana penelitian ini menggunakan enam indikator setelah melalui uji *convergent validity*. Adapun enam indikator tersebut adalah kemampuan memahami PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No.8 Tahun 2006; membaca literature akuntansi; kemampuan menyusun laporan keuangan; bekerja sesuai etika dan kode etik akuntansi; konsisten melaksanakan tugas; keinginan dalam mengikuti diklat akuntansi.

Berdasarkan hasil analisis berhubungan dengan *outer loading*, pada variabel *kompetensi sumber daya manusia*, dimana menunjukkan bahwa indikator yang memiliki *outer loading* tertinggi adalah berhubungan dengan *bekerja sesuai etika dan kode etik akuntansi*, yaitu sebesar 0,838. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *bekerja sesuai etika dan kode etik akuntansi*, dimana terdapat responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 responden (3,60 %) atas pernyataan berhubungan tentang “*melakukan setiap pekerjaan berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan*”.

Indikator yang memiliki *outer loading* kedua adalah berhubungan dengan *kemampuan menyusun laporan keuangan* yaitu sebesar 0,831. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *kemampuan menyusun laporan keuangan* dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden (4,50 %) atas pernyataan berhubungan tentang *memiliki kemampuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010*.

Indikator yang memiliki *outer loading* ketiga adalah berhubungan dengan *keinginan dalam mengikuti diklat akuntansi*, yaitu sebesar 0,810. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *keinginan dalam*

*mengikuti diklat akuntansi* dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden (3,60 %) atas pernyataan berhubungan tentang *memiliki keinginan dan kemauan dalam mengikuti Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) akuntansi agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam penyusunan keuangan keuangan*.

Indikator yang memiliki *outer loading* keempat adalah berhubungan dengan *membaca literature akuntansi*, yaitu sebesar 0,805. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *membaca literature akuntansi*, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden (4,50 %) atas pernyataan berhubungan tentang *memiliki keinginan dan kemauan untuk membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-Upgrade pengetahuan dibidang akuntansi*.

Indikator yang memiliki *outer loading* kelima adalah berhubungan dengan *kemampuan memahami PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No.8 Tahun 2006*, yaitu sebesar 0,727. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *kemampuan memahami PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No.8 Tahun 2006*, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *memiliki kemampuan memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik*.

Indikator yang memiliki *outer loading* paling rendah adalah berhubungan dengan indikator *konsisten melaksanakan tugas*, yaitu sebesar 0,650. Adapun hasil analisis deskriptif berhubungan dengan pernyataan responden tentang *konsisten melaksanakan tugas*, dimana masih terdapat responden menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden (1,80 %) atas pernyataan berhubungan tentang *menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan*.

Temuan ini tentu sejalan dengan kondisi dilingkungan Poldas Sumatera Utara, dimana keberadaan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan terus dilakukan perbaikan. Walaupun latar belakang pegawai yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan masih terbatas. Namun upaya dalam meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia terus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dalam bidang akuntansi dan kesempatan dalam mengikuti pelatihan. Upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dilingkungan

Polda Sumatera Utara tentunya secara tidak langsung akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. hal ini sejalan dengan temuan penelitian Setyowati, *dkk.*, (2016) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. begitu juga temuan penelitian Pujanira dan Taman (2017), bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan tentu dikuatkan dari pandangan Sedarmayanti (2009) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap kinerja, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Bahkan dalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Namun temuan penelitian di atas tentu bertolak belakang dengan temuan penelitian lainnya. Dimana Setyawan (2018) mengemukakan, bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Se Kabupaten Tegal. Selanjutnya Animah, *dkk.*, (2020), menemukan, bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **4. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dalam menguji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada lingkungan Polda Sumatera Utara. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada lingkungan Polda Sumatera Utara. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada lingkungan Polda Sumatera Utara.

## 4.2. Implikasi

Temuan penelitian ini tentu dapat menjadi dasar bagi institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan perbaikan dan menyediakan infrastruktur teknologi dan informasi, meningkatkan profesionalitas pegawai dan pimpinan dalam bidang keuangan (auditor) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Serta menempatkan pegawai yang memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan akuntansi dan memiliki sertifikasi auditor/keuangan.

## 4.3. Keterbatasan

Pada dasarnya banyak aspek yang dapat dianalisis dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun penelitian ini hanya membatasi pada tiga aspek yaitu sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari terbatasnya referensi yang peneliti miliki, sulitnya mendapatkan data khususnya berhubungan dengan masalah keuangan dan sebagainya. Keterbatasan lain adalah sulitnya mendapatkan data dari rensponden disebabkan tingkat responsibilitas mereka terhadap kajian yang penulis lakukan memiliki efek terhadap penilaian kinerja pegawai. Disamping itu luasnya objek kajian yaitu diseluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang berada dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjadi proses pengumpulan data mengalami keterlambatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbariah Fitri dan Suratno. 2018. Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Agama Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* 5(1):37-52.
- Almumtahanah dan Samukri. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi* 8(2): 146–54.
- Animah, Adhitya Bayu Suryantara, dan Widia Astuti. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J.A.A* 5(1).
- Anisma, Liza Rahayu Kennedy dan Yuneita. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau. *Jom Fekon* 1(2): 1–15.

- Astrawan, Kadek Pande., Wahyuni, Made Arie., dan Herawati, Nyoman Trisna. 2016. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 6(3):
- Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2015. *Partial Least Squares Konsep Teknik Dan Aplikasi Dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR–Study & Accounting Research* 11(1):1–14.
- Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mokoginta, Novtania; Lambey, Linda; dan Pontoh, Winston. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.12(2):874-890
- Nugraheni, Purwaniati, and Imam Subaweh. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 13(1).
- Pasha, Arizal Kamal. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan). Skripsi Non-publikasi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Patongai, W.S. Nengsih W.; Palampanga, Anhulaila M.; dan Yusnita, Nina. 2018. Pengaruh Kualitas Data Input, Tingkat Pemahaman Dan Tingkat Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD di Kabupaten Tolitoli). *e-Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 2 Februari 2018 hlm 86-97*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/10097/8036>
- Pujanira, Putriasri dan Taman, Abdullah. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal* 6(2).
- Purnomo, Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(1): 276–88.
- Rahman, Dicky. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

- Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Riau). *Jom Fekon* 2(2): 1–15.
- Riyadi, Wulan. 2020. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemahaman Akuntansi Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 1(1).
- Romney, Steinbart dan Marshall. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edited by Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. 13th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusvianto, Dimas; Mulyani, Sri; dan Yuliafitri, Indri. 2018. Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal Banque Syar'i* 4(1).
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Setyawan, Setia Andi. 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Desa yang Memiliki BUMDes Se Kabupaten Tegal). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
<http://eprints.ums.ac.id/61787/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Setyowati, Lilis., Isthika, Wikan., dan Pratiwi, Ririh Dian. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja* 20(2):179-191.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edited by PT. Alfabet. Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Uviyanti, Siti, and Bambang Agus Pramuka. 2020. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (Bos).” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(7): 471–80.
- Yendrawati, Reni. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akunatnsi dan Auditing Indonesia* 17(2).
- Yensi, Desy Sefri, Amir Hasan, and Yuneita Anisma. 2015. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi).” *Urnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* 1(2): 1–15.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan*  
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 *Tentang Administrasi  
Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*